

# Persepsi Publik Terhadap Aksesibilitas dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh

Rola Manjaleni

Program studi Akuntansi STIE STEMBI

rolamanjaleni@stembi.ac.id

## Abstrak

**Tujuan** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi publik terhadap aksesibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh.

**Desain/Metode** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengujian hipotesis analisis One-Way Anova dengan SPSS 21

**Temuan** Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat perbedaan persepsi antara Pemerintah, Masyarakat, Pengawas terhadap aksesibilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. 2) terdapat perbedaan persepsi antara Pemerintah, Masyarakat, Pengawas terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh.

**Implikasi** Pemerintah Provinsi Aceh dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan dengan terbuka dan jujur dimana penyajian laporan keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan mudah diakses oleh publik maka akan berdampak terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

**Originalitas** Penelitian persepsi publik terhadap aksesibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh belum pernah dilakukan sebelumnya.

**Tipe Penelitian** Studi Empiris/

**Kata Kunci** : Aksesibilitas, Akuntabilitas, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## I. Pendahuluan

Memasuki masa reformasi, masyarakat mulai kritis terhadap pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Tumbuhnya kesadaran publik terhadap penyelenggaraan kegiatan instansi sektor publik menyebabkan adanya ketidakpuasan terhadap instansi Pemerintah. salah satu instrumen publik dalam menilai kinerja Pemerintah dalam kegiatan pengelolaan keuangan adalah laporan keuangan, sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 yang memuat mengenai pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan Pemerintah adalah milik publik yang memiliki keharusan untuk disampaikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP menjelaskan pengguna laporan keuangan Pemerintah dibagi menjadi 4, yaitu: 1) Masyarakat, 2) Para wakil rakyat, Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemeriksa, 3) pihak yang berperan dalam donasi, investasi dan pinjaman, 4) Pemerintah. Selain itu, hal utama dalam menjamin penyelenggaraan Pemerintah yang baik sebagai wujud dari akuntabilitas adalah transparansi. Salah satu wujud transparansi adalah akses informasi yang mudah. Aksesibilitas

adalah kemampuan dalam memberikan jalan atau akses kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dengan prinsip mudah dan murah baik untuk mengetahui maupun mendapatkan informasi keuangan dengan prinsip mudah dan biaya murah (Sagala, 2011). UU No. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa setiap informasi publik dapat diakses dan bersifat terbuka oleh setiap pengguna informasi publik. Pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur, melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan mudah diakses oleh publik maka akan berdampak terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebaliknya jika penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah (Miftahul, 2017)

Provinsi Aceh merupakan satu dari beberapa daerah otonom, dimana Pemerintah Daerahnya memiliki wewenang, kewajiban dan hak otonom dalam mengelola dan mengatur sendiri dalam hal kepentingan publik dan urusan Pemerintah setempat sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004. Sebagai salah satu daerah otonom yang diberikan kesempatan tersebut maka akuntabilitas laporan keuangan sangat menjadi perhatian masyarakat. Maka, laporan keuangan diharuskan untuk memperoleh opini terbaik dari BPK dengan predikat WTP. Pertanggungjawaban laporan keuangan tersebut juga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas *agent* kepada *principal*. *Agency problem* muncul pada saat *principal* menghadapi kendala ketika mengendalikan *agent*, ketika terjadi kepentingan yang berbeda antara *principal* dan *agent* maka akan menimbulkan masalah keagenan sehingga masing-masing memiliki persepsi yang berbeda dalam menginterpretasikan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu daerah otonom, Pemerintah Aceh diharuskan terus dapat meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan dalam menyajikan informasi keuangan kepada publik.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang persepsi publik terhadap aksesibilitas dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini terdapat tiga kelompok publik yang terdiri dari kelompok Pemerintah yang diwakili oleh pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Aceh, kelompok Masyarakat yang diwakili oleh Anggota DPRD/DPRA Komisi III, V dan LSM, kelompok Pengawas diwakili oleh auditor BPK dan BPKP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi terhadap tiga kelompok publik mengenai aksesibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. Tulisan ini dilanjutkan dengan telaah literatur terkait teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan, pembahasan hasil temuan disajikan pada bagian kedua. Metode penelitian yang digunakan dibahas bagian ketiga dan dilanjutkan dengan bagian keempat yang menjelaskan hasil temuan dan pembahasannya. Kesimpulan menjadi bagian terakhir dalam penulisan ini.

## II. Kajian Teori

### Persepsi Publik

Persepsi merupakan proses penginterpretasian individu terhadap informasi-informasi dari lingkungannya (Purnomo, 2016). Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu proses seseorang menyadari beberapa hal melalui penginderaan atau respon atau tanggapan

langsung dari sesuatu. Publik didefinisikan unit sosial aktif yang secara bersama-sama mencari solusi yang terdiri dari semua pihak yang terlibat mengenali masalah tersebut (Cutlip, 2006). Sedangkan, Kriyanto (2009) menyatakan bahwa publik adalah sekumpulan orang atau kelompok didalam masyarakat yang mempunyai perhatian atau hal terhadap sesuatu hal. Dalam penelitian ini, persepsi publik diasumsikan sebagai tanggapan atau penilaian seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas dan perilaku sebuah organisasi atau perusahaan.

### **Aksesibilitas**

Menurut Hehanusa (2015), “aksesibilitas merupakan kemampuan untuk memberikan akses atau jalan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi”. Selanjutnya menurut Fauzani (2018), “Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas menurut KBBi yaitu sesuatu hal yang dapat dijadikan akses atau yang dapat dikaitkan. Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koester, 2002 dalam Lewier, 2016). Selanjutnya, Dari beberapa penjelasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa aksesibilitas berhubungan erat dengan dengan ketersediaan dan kemudahan.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas mengandung arti berupa pertanggungjawaban terhadap tindakan-tindakan dan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun lembaga-lembaga terpilih. Akuntabilitas merupakan keharusan dalam melaporkan dan menyediakan segala kegiatan maupun tindak-tanduk yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Mardismo, 2015). Purnomo (2016: h.93), “akuntabilitas adalah instrumen yang menunjukkan apakah prinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakkan dan kesamaan di hadapan hukum telah dihargai atau tidak, suatu akuntabilitas tidak abstrak namun kongkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan”.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Setiap organisasi publik pada dasarnya wajib mempertanggungjawabkan semua proses kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ataupun publik agar dapat mencerminkan bentuk akuntabilitas dan transparansi yang baik. Laporan keuangan yang dilaporkan setiap instansi publik harus dilaksanakan secara konsisten, terbuka dan tepat waktu. PP No. 71 tahun 2010 mengenai pengelolaan keuangan daerah, “kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban terdiri dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan”. Secara khusus, laporan keuangan Pemerintah memiliki tujuan yaitu menyediakan dan menyajikan informasi-informasi keuangan yang bermanfaat dalam menunjukkan akuntabilitas dan pengambilan keputusan.

## Teori Keagenan

Teori keagenan timbul dikarenakan adanya kaitan antara *principal* dan *agent*. *Agent* ditugaskan untuk melaksanakan tugas tertentu serta memiliki tanggung jawab pada tugas yang diberikan oleh *principal*. Menurut Mack dan Ryan (2006), “didalam akuntabilitas, sektor pribadi maupun sektor publik memiliki kaitan resmi diantara pihak *principal* dan *agent*, yang mana *agent* sebagai pemegang tanggungjawab dalam melaksanakan suatu kegiatan dan *principal* memberikan arahan”. Kaitannya penelitian ini dengan teori keagenan yaitu Pemerintah selaku *agent* (yang mengelola) menentukan rencana tertentu agar pelayanan yang terbaik dapat diberikan kepada publik atau *stakeholder* sebagai pihak *principal*. Akuntabilitas dalam kaitan *agent* dan *principal* menjadi penting untuk menggambarkan bahwa *agent* telah melaksanakan suatu kegiatan sesuai arahan *principal*. Mardiasmo (2006), “penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas”.

### III. Metode Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yaitu mengungkap variabel atau situasi sesuai dengan keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan yaitu untuk mengerahui persepsi publik terhadap aksesibilitas dan akutabilitas laporan keuangan PEMDA. Populasi didalam penelitian yaitu publik sebagai pengguna laporan keuanga PEMDA di Provinsi Aceh. Peneliti mengelompokkan publik kedalam tiga kelompok sampel yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Pengawas. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil dalam penelitian yang memenuhi kriteria pengguna laporan keuangan Provinsi Aceh, terdiri dari 50 Pegawai SKPA (Pemerintah), 21 Anggota DPRA dan 15 anggota LSM (Masyarakat), 20 auditor BPK dan 34 auditor BPKP (Pengawas).

Instrumen yang digunakan untuk mengukur persepsi aksesibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan menggunakan kuesioner sesuai dengan indikator-indikator variabel yang ada didalam penelitian Waode Alnur Mulia (2016) dan penelitian Wijaya, Susanti, Afriani (2014) yang kemudian dimodifikasi. Skala pengukuran menggunakan skala *likert* empat (1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=setuju, 4=sangat setuju). Pengujian hipotesis menggunakan analisis Anava Satu Arah (*One-Way Anova*) dengan SPSS 21.

### IV. Hasil Dan Pembahasan Perbedaan Persepsi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pengawas terhadap Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian untuk hipotesis pertama menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan antara Pemerintah, Masyarakat dan Pengawas mengenai aksesibilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. Hasil analisis *Anova* pada variabel diperoleh nilai F hitung sebesar 381,474 dengan *P-value* sebesar 0,000. Dimana jika *P-value* <  $\alpha=0,05$  maka  $H_0$  ditolak, yang artinya bahwa terdapat perbedaan persepsi antara kelompok Pemerintah, Masyarakat, Pengawas terhadap aksesibilitas laporan keuangan. Pada pengujian perpasangan variabel aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan pasangan yang berbeda secara signifikan, hal ini terlihat pada pasangan Pemerintah-Pengawas dan Pemerintah-Masyarakat dimana nilai sig. kedua pasangan tersebut masing-masing adalah 0,000 atau lebih kecil dari

alpha ( $\alpha=0,05$ ), sebaliknya pada pasangan Pengawas-Masyarakat menunjukkan tidak terdapat perbedaan, hal ini terlihat dari nilai sig. yaitu 0,069 atau lebih besar dari alpha ( $\alpha=0,05$ ). Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2014) yang menyatakan adanya perbedaan persepsi pengguna laporan keuangan terhadap akuntabilitas dan publikasi berkaitan dengan transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah di Surakarta.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap aksesibilitas laporan keuangan, dimana kelompok Pemerintah menyatakan bahwa publikasi dan aksesibilitas laporan keuangan selalu diupayakan agar dapat dipublikasi dan dapat diakses kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah dan cepat, namun kurangnya anggaran untuk pelayanan informasi dan sarana dan prasarana IT yang belum memadai dilingkungan semua SKPA membuat publikasi melalui *website* menjadi terhambat. Namun, sejauh ini SKPA selalu berupaya memberikan akses terbaik bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Kelompok masyarakat menyatakan bahwa publikasi, akses dan ketersediaan informasi mengenai laporan keuangan masih sulit diakses dan sulit terbuka, padahal informasi laporan keuangan adalah hak masyarakat sebagai pemilik dana dan masyarakat memiliki hak untuk diberikan informasi. Penyelesaian sengketa informasi publik juga setiap tahunnya terus bertambah akibat dari permohonan informasi terkait laporan keuangan yang tidak direspon, itu menandakan bahwa ada beberapa informasi laporan keuangan yang masih tidak dapat diperoleh dengan mudah. Pengawas menyatakan bahwa akses informasi keuangan tidak memiliki hambatan, hanya saja membutuhkan prosedur-prosedur yang harus diikuti. Namun, publikasi yang belum dilaksanakan secara maksimal dan ketersediaan layanan informasi belum semua SKPA menyediakan melalui *website* begitu juga dengan meja layanan informasi sehingga aksesibilitas laporan keuangan tidak dapat dijangkau mudah oleh masyarakat luas.

### **Perbedaan Persepsi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pengawas terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh.**

Hasil penelitian ini menggambarkan adanya perbedaan persepsi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pengawas terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. Hasil uji *Anova* pada variabel akuntabilitas laporan keuangan diperoleh nilai *F* hitung sebesar 74,442 dengan nilai *P-value* sebesar 0,000. Dimana jika nilai *P-value*  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, yang berarti bahwa terdapat perbedaan persepsi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pengawas terhadap akuntabilitas laporan keuangan PEMDA. Pengujian perpasangan pada variabel akuntabilitas laporan keuangan menunjukkan bahwa seluruh pasangan berbeda. Hal ini terlihat bahwa pasangan Pemerintah-Pengawas, Pemerintah-Masyarakat dan Masyarakat-Pengawas memiliki nilai sig. masing-masing 0,000, 0,000, 0,001. Seluruhnya lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  yang berarti bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai akuntabilitas laporan keuangan pada setiap kelompok publik.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan Purnomo (2016), menjelaskan bahwa adanya perbedaan persepsi antara Pemerintah, Masyarakat dan Pengawas terhadap akuntabilitas laporan keuangan PEMDA di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan memiliki persepsi yang berbeda pada setiap kelompok. Pemerintah menyatakan bahwa integritas

keuangan, pengungkapan wajib dilakukan dalam penyampaian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan sebagai salah satu upaya patuh pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil opini BPK terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang terus WTP dalam beberapa tahun menjadikan bukti bahwa akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah tercipta dengan baik. Kelompok Masyarakat mengungkapkan bahwa integritas keuangan diragukan karena beberapa diantaranya memiliki cacat hukum, laporan hasil pemeriksaan auditor yang masih banyak menemukan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dari setiap Pemerintah Daerah di Kabupaten, serta terus terjadinya kasus-kasus korupsi yang mencerminkan masih rawan terjadinya kecurangan akuntansi. Pengungkapan informasi akuntansi juga masih dibatasi terlihat dari akses informasi yang tidak terbuka sehingga menimbulkan terjadinya sengketa informasi sebagai hasil dari akses informasi yang tidak direspon, tentunya hal itu sangat berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang belum baik. Pengawas menyatakan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan opini kewajaran penyajian pada laporan keuangan namun bukan merupakan jaminan tidak adanya atau tidak ada kemungkinan terjadinya penyimpangan (*fraud*) yang ditemui. Opini WTP pada Provinsi Aceh dapat lebih mendorong terciptanya akuntabilitas laporan keuangan. Untuk indikator integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap undang-undang dalam pemeriksaan masih ditemukan beberapa temuan yang menjadi persepsi berbeda-beda di mata masyarakat luas. Besarnya kegunaan yang didapat dari pemeriksaan ini bukan terletak pada rekomendasi yang dibuat atau temuan pemeriksaan yang dilaporkan, namun terletak pada efektivitas Pimpinan di PEMDA dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, serta memelihara dan menciptakan suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. penelitian lain yang sependapat adalah yang dilakukan oleh Wulandhari (2009), menjelaskan bahwa adanya perbedaan persepsi antara *External dan internal Users* terhadap akuntabilitas laporan keuangan PEMDA di Pemkot Surakarta.

## V. Penutup

Didalam penelitian ini kesimpulan yang dapat diberikan yaitu terdapat perbedaan persepsi antara Pemerintah, Masyarakat dan Pengawas terhadap aksesibilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan terdapat perbedaan persepsi antara Pemerintah, Masyarakat dan Pengawas terhadap akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan masing-masing kelompok mempunyai interpretasi tersendiri terhadap kriteria yang dipakai dalam menilai aksesibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan.

Adapun saran dari peneliti yang dapat diberikan adalah Pemerintah Provinsi Aceh dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan dengan terbuka dan jujur dimana penyajian laporan keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan mudah diakses oleh publik maka akan berdampak terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan meminimalkan adanya perbedaan persepsi pada masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Bandariy, Himmah. (2011). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 20011). Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/30992/>.
- Hartanti, Karina. (2011). *Pandangan Publik terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 20011). Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/29511/>
- Hehanussa, J. Salomi. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. *Paper dipresentasikan di 2<sup>nd</sup> Conference in Business, Accounting, and Management*. Sultan Agung Islamic University, Indonesia.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Mulyana, Budi. (2006). *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 (1), 1-21.
- Nordiawan, Deddi. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purnomo, Dheny. (2016). *Persepsi Users terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Katalogis, Universitas Tadulako*. 4 (6), 91-100.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rahmanurrasjid, Amin. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemeritnah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik di Daerah*. (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 2008). Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/16411/>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods)*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta.
- Tripett, John dan Kluvers. (2010). *Accountability and Information in Local Government*. *World Journal of Management*. 2 (3), (22-23).
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Winarna, Jaka dan Murni, Sri. (2014). *Persepsi Users terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Eks Karisidenan Surakarta)*. *Jurnal of Rural and Development*. V (1), (81-96).
- Wulandari. Suci. 2009. *Persepsi Users atas Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah*. (Tesis. Magister Akuntansi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2009). Diakses dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/16083/MzExODQ=/Persepsi-Users-Atas-Akuntabilitas-Laporan-Pertanggungjawaban-Kuangan-Pemerintah-Daerah-Studi-Kasus-Di-Pemerintah-Kota-Surakarta-abstrak.pdf>